



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG ILMU POLITIK**

**PENGEMBANGAN MODEL MEDIATOR
RASIONAL BERBASIS PERUBAHAN
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT
DAN AKSI MEDIASI DALAM
SENGKETA IRIAN BARAT**



**OLEH:
SISWANTO**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
JAKARTA, 23 DESEMBER 2021**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

**PENGEMBANGAN MODEL MEDIATOR
RASIONAL BERBASIS PERUBAHAN
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT
DAN AKSI MEDIASI DALAM
SENGKETA IRIAN BARAT**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

© Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang No. 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

Buku ini tidak diperjualbelikan.



**ORASI PENGUKUHAN PROFESOR RISET
BIDANG ILMU POLITIK**

**PENGEMBANGAN MODEL MEDIATOR
RASIONAL BERBASIS PERUBAHAN
KEBIJAKAN AMERIKA SERIKAT
DAN AKSI MEDIASI DALAM
SENGKETA IRIAN BARAT**

**OLEH:
SISWANTO**

**BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
JAKARTA, 23 DESEMBER 2021**

© 2021 Badan Riset dan Inovasi Nasional
Pusat Riset Politik Organisasi Riset Ilmu Sosial dan Humaniora

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Pengembangan Model Mediator Rasional Berbasis Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dan Aksi Mediasi dalam Sengketa Irian Barat/Siswanto. Jakarta: LIPI Press, 2021.

xi + 45 hlm.; 14,8 x 21 cm

ISBN 978-602-496-309-5 (cetak)
978-602-496-308-8 (e-book)




- | | |
|-------------------|------------------------------|
| 1. Model Mediator | 2. Kebijakan Amerika Serikat |
| 3. Aksi Mediasi | 4. Sengketa Irian Barat. |

361.003

Copy editor : Hanifa Widyas Sukma Ningrum dan Risma Wahyu H.
Proofreader : Rina Kamila dan Sarwendah P. Dewi
Penata Isi : Rahma Hilma Taslima
Desainer Sampul : Dhevi E.I.R. Mahelingga

Cetakan : Desember 2021



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id
 PenerbitBRIN
 Penerbit_BRIN
 penerbit_brin

Buku ini tidak diperjualbelikan.

BIODATA RINGKAS



Siswanto, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Januari 1962, adalah anak pertama dari Alm. Hartono bin Sahir dan Almh. Rusmini binti Palip. Siswanto menikah dengan Etna Yuniza dan dikaruniai dua orang anak, yaitu Ibnu Wicaksono dan Aqmarina Mahadibya.

Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80/M Tahun 2019 yang bersangkutan diangkat sebagai Peneliti Utama Golongan IV/d terhitung mulai tanggal 3 Desember 2019.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional 107/HK/2021 tanggal 10 Desember 2021 tentang Pembentukan Majelis Pengukuhan Profesor Riset, yang bersangkutan dapat melakukan pidato pengukuhan Profesor Riset.

Menamatkan Sekolah Dasar (SD) Negeri Makasar II Jakarta pada tahun 1974, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri XLIX Jakarta pada tahun 1977, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 39 Jakarta pada tahun 1981, memperoleh Gelar Sarjana (S1) dari Jurusan Hubungan Internasional, Fisipol, Universitas Jayabaya pada tahun 1987, gelar Magister (S2) dari Program Kajian Wilayah Amerika, Pascasarjana, Universitas Indonesia pada tahun 1997, dan gelar Doktor (S3) dari Jurusan Ilmu Seja-

rah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia pada tahun 2008.

Pernah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan (Diklatpim) Tk.IV pada tahun 1997 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Pernah mengikuti *The Individual Training Course, in Science and Technology Administration* pada tahun 1999 di Ishikawa Prefecture, Jepang, yang diselenggarakan oleh *Japan International Cooperation Agency (JICA)*.

Masuk di LIPI tahun 1990 dan diawali menjadi pegawai di Biro Kerja Sama Iptek (BKI)-LIPI sampai tahun 1999, lalu menjadi peneliti di Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik-LIPI) sejak tahun 1999–sekarang.

Pernah menjabat sebagai Kepala Sub. Bagian Kerja Sama Regional Biro Kerja Sama Iptek (BKI) LIPI tahun 1997–1999, kemudian Kepala Bidang Perkembangan Eropa, Pusat Penelitian Sumber Daya Regional (PSDR) LIPI tahun 2009–2015, dan Kepala Bidang Pengelolaan & Diseminasi Hasil Penelitian P2 Politik LIPI tahun 2015–2017.

Jabatan fungsional peneliti diawali sebagai Ajun Peneliti Muda tahun 2000, lalu Ajun Peneliti Madya tahun 2002, Peneliti Muda tahun 2004, Peneliti Ahli Madya tahun 2006, dan Peneliti Ahli Utama tahun 2020.

Telah menghasilkan publikasi sebanyak 40 karya tulis ilmiah (KTI), baik yang ditulis sendiri maupun bersama penulis lain,

dalam bentuk buku dan jurnal. Sebanyak 5 KTI ditulis dalam bahasa Inggris.

Mendapatkan penghargaan Satyalancana Karya Satya X Tahun pada 2001, Satyalancana Karya Satya XX Tahun pada 2010, dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun pada 2021 dari Presiden Republik Indonesia.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

DAFTAR ISI

BIODATA RINGKAS	v
PRAKATA PENGUKUHAN	xi
I. PENDAHULUAN	1
II. ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI: PERSPEKTIF DAN PENDEKATAN	5
III. PERGESERAN POLA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN IMPLIKASINYA	9
IV. MODEL MEDIATOR RASIONAL: FUSI MODEL AKTOR RASIONAL DAN PRINSIP-PRINSIP MEDIASI	14
4.1 Kondisi Objektif Sengketa Irian Barat: Peluang dan Kendala Amerika Serikat (<i>Threats and Opportunities</i>)	14
4.2 Tujuan Perubahan Kebijakan Amerika Serikat (<i>The State's Goals</i>)	15
4.3 Pilihan Objektif Kebijakan AS terhadap Sengketa Irian Barat (<i>Options for Addressing This Issue</i>)	15
4.4 Risiko dan Manfaat Strategis dari Setiap Opsi (<i>Strategic Cost and Benefits of Each Option</i>)	16
4.5 Pilihan Terbaik Kebijakan Amerika Serikat terhadap Sengketa Irian Barat (<i>The Best Choice Gives These Conditions</i>)	16
V. MODEL MEDIATOR RASIONAL DAN POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEKUATAN MENENGAH	23
VI. KESIMPULAN	25
VII. PENUTUP	27
UCAPAN TERIMA KASIH	28
DAFTAR PUSTAKA	30
LAMPIRAN	33
DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH	36
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	40

Buku ini tidak diperjualbelikan.

PRAKATA PENGUKUHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Majelis Pengukuhan Profesor Riset yang mulia dan hadirin yang saya hormati.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Swt. atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya sehingga dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul dan bersama-sama hadir pada acara orasi ilmiah Pengukuhan Profesor Riset di Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).

Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan segala kerendahan hati, izinkan saya menyampaikan orasi ilmiah dengan judul:

**“PENGEMBANGAN MODEL MEDIATOR RASIONAL
BERBASIS PERUBAHAN KEBIJAKAN
AMERIKA SERIKAT DAN AKSI MEDIASI
DALAM SENGKETA IRIAN BARAT”**

Buku ini tidak diperjualbelikan.

I. PENDAHULUAN

Amerika Serikat (AS) adalah negara adidaya pemenang Perang Dunia ke-2 sekaligus pemenang Perang Dingin¹. AS memiliki peran penting dalam pembangunan kembali Eropa Barat setelah usai Perang Dunia ke-2 melalui program ekonomi Marshall Plan (1947–1951). AS juga menjadi “payung militer” Eropa Barat dari ancaman Uni Soviet sehingga dibentuk Pakta Pertahanan Atlantik Utara pada tahun 1949². Pada era Perang Dingin, AS terlibat persaingan pengaruh dengan Uni Soviet di Eropa, Timur Tengah, Amerika Latin, dan Asia. Sementara itu, di era Pasca-Perang Dingin, AS menjadi negara adidaya tunggal. Sampai akhirnya AS terlibat persaingan pengaruh menghadapi Tiongkok di Asia Tenggara, khususnya di Laut Cina Selatan, setelah negara tirai bambu ini bangkit menjadi kekuatan besar³.

Dalam konteks hubungan bilateral Indonesia-AS, kebijakan luar negeri AS dalam kasus tertentu merugikan, tetapi dalam kasus yang berbeda bisa menguntungkan. Kasus kebijakan luar negeri yang menguntungkan Indonesia adalah dukungan AS terhadap perundingan Irian Barat di era Presiden John F. Kennedy tahun 1961⁴. Kasus kebijakan luar negeri AS yang merugikan Indonesia antara lain adalah dukungan kepada kemerdekaan (*self-determination*) Timor Timur di era Presiden Bill Clinton tahun 1999^{5,6}.

Pada tahun 1961, kebijakan AS terhadap sengketa Irian Barat mengalami perubahan dari Kebijakan Pasif Netral (*Passive Neutral Policy*) menjadi Kebijakan Aktif Mediasi (*Active Mediation Policy*)⁷. Secara internal, perubahan ini dipengaruhi oleh pandangan elit politik bahwa AS sebaiknya memiliki peran politik dalam sengketa Irian Barat. Secara eksternal, perubahan ini tidak terlepas dari meningkatnya eskalasi konflik antara

Belanda dan Indonesia dalam memperebutkan Irian Barat. Eskalasi konflik ini berpotensi menyulut perang terbuka, masuknya pengaruh Uni Soviet (komunis) ke Indonesia, dan perubahan perimbangan kekuatan di Asia Tenggara⁸ sebagai kawasan strategis dalam Perang Dingin⁹.

Setelah mengubah kebijakan atas sengketa Irian Barat, AS menindaklanjutinya dengan diplomasi mediasi agar Belanda dan Indonesia menuju meja perundingan. Dalam hal ini, AS menentukan strategi mediasi, yaitu tanpa syarat, informal, tertutup, proses mediasinya bertahap, dan solusi dari mediasi yang berkembang adalah *Bunker Plan* ke-1 dan *Bunker Plan* ke-2. Sampai akhirnya, AS berhasil menggiring Belanda dan Indonesia menandatangani Perjanjian New York 1962.

Untuk memahami perubahan kebijakan ini, kandidat menggunakan pendekatan Pengambilan Keputusan (*Decision Making*), khususnya Model Aktor Rasional (MAR) (*Rational Actor Model*), Model Pilihan Rasional (MPR) (*Rational Choice Model*), dan Prinsip-Prinsip Mediasi (PPM). Kandidat menggunakan MAR, MPR, dan PPM dalam memahami perubahan kebijakan dan aksi mediasi AS ini karena dipandang relevan. Perubahan kebijakan dan aksi mediasi AS ini menjadi pembelajaran (*lesson learned*) bagi masyarakat. Lebih lanjut, MAR menjadi inspirasi dan katalisator dalam menyusun pengertian atau konsep baru tentang mediasi, yaitu Model Mediator Rasional (MMR) yang pada hakikatnya merupakan fusi antara MAR dan PPM.

Demi memudahkan pemahaman, buku orasi ini dibagi ke dalam sistematika penulisan, yaitu 1) Pendahuluan; 2) Analisis Kebijakan Luar Negeri: Perspektif dan Pendekatan; 3) Pergeseran Pola Kebijakan Luar Negeri Amerika Serikat dan Implikasinya; 4) Model Mediator Rasional: Fusi Model Aktor Rasional

dan Prinsip-Prinsip Mediasi; 5) Model Mediator Rasional dan Posisi Indonesia sebagai Negara Kekuatan Menengah (*Middle Power*); 6) Kesimpulan; dan 7) Penutup.

II. ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI: PERSPEKTIF DAN PENDEKATAN

Kebijakan luar negeri adalah strategi atau pendekatan yang dipilih oleh suatu negara dalam mencapai tujuan dan berinteraksi dengan entitas internasional¹⁰. Kebijakan luar negeri dapat dijelaskan dari perspektif historis-evolusi, khususnya pendekatan Pengambilan Keputusan dan diplomasi. Kebijakan luar negeri adalah strategi dalam merespons negara lain yang bisa dipahami dari berbagai perspektif.

Beragam pemikiran tentang kebijakan luar negeri sudah dikembangkan oleh pakar. Dari perspektif historis-evolusi, analisis kebijakan luar negeri dibedakan ke dalam beberapa pendekatan, yaitu 1) Pengambilan Keputusan yang dikembangkan oleh Richard C. Snyder dkk. pada tahun 1954. Fokus pendekatan ini adalah penjelasan atas proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri ketimbang hanya penjelasan keluaran (*output*); 2) Prateori (*Pre-theories*) dan teori-teori kebijakan luar negeri yang dikembangkan oleh James N. Rosenau pada tahun 1964. Fokus kajiannya adalah pengembangan teori-teori aktor (*actor-specific theory*) yang ditujukan untuk pengembangan generalisasi proposisi teori tingkat menengah; 3) Teori Lingkungan Manusia (*Man-Milieu*) dalam politik internasional yang dikembangkan oleh Harold dan Margaret Sproud pada tahun 1965. Fokus kajiannya adalah kebijakan luar negeri yang dijelaskan dari segi kejiwaan (*psycho-milieu*) para individu yang terlibat dalam pengambilan keputusan (*decision maker*). Segi kejiwaan di sini adalah dalam konteks psikologi, situasi, politik, dan sosial dari para pengambil keputusan¹⁰.

Pendekatan Pengambilan Keputusan dari Snyder yang menekankan analisis kebijakan luar negeri pada proses dan struktur

ini dikembangkan lebih lanjut oleh Graham Allison. Dia menggunakan pendekatan Pengambilan Keputusan dalam menjelaskan kasus krisis peluru kendali di Kuba pada tahun 1962 dalam bukunya berjudul *Essence of Decision* (1971). Allison mengembangkan tiga model dalam pendekatan Pengambilan Keputusan, yaitu Model Aktor Rasional (*The Rational Actor Model*), Model Proses Organisasi (*The Organizational Process Model*), Model Politik Birokrasi (*The Bureaucratic Politics Model*)¹¹.

Pengambilan keputusan kebijakan luar negeri dilakukan secara rasional dan memperhitungkan aspek empiris¹. Model Aktor Rasional (MAR) dari Allison digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri yang melahirkan perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) atas sengketa Irian Barat dari Kebijakan Pasif Netral menjadi Kebijakan Aktif Mediasi. Kerangka analisis MAR digunakan untuk memahami proses pengambilan keputusan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan sebagai berikut:

- 1) Apa persepsi negara atas keadaan yang dianggap sebagai peluang atau ancaman?

(What are the objective (or perceived) circumstances that the state conceives as threats and opportunities?)

- 2) Apa tujuan dari suatu negara?

(What is the state's goals?)

- 3) Apa persepsi negara atas berbagai opsi yang ada dalam mengatasi masalah ini?

(What are the objective (or perceived) options for addressing this issue?)

- 4) Apa persepsi negara atas manfaat strategis dan risiko dari masing-masing opsi?

(What are the objective (or perceived) strategic cost and benefits of each option?)

- 5) Apa pilihan terbaik negara yang diberikan atas berbagai kondisi ini?¹¹

(What is the state's best choice gives these conditions?)

Kerangka analisis ini diperkuat oleh Model Pilihan Rasional (*Rational Choice Model*) yang dikembangkan oleh Drake dalam Mesquita (2010). MPR mengidentifikasi bahwa MAR memiliki asumsi-asumsi dalam menguatkan pemahaman atas suatu kebijakan yang dipilih dan peran dari sistem nilai yang dianut para pengambil keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Pendekatan Rational Aktor berpandangan bahwa seorang pengambil keputusan memiliki kebebasan dalam mencapai tujuan melalui proses analisis rasional yang cermat, yaitu menggunakan studi komprehensif dan objektif dari semua informasi dan alternatif terkait.

(The Rational Actor approach presumes that such a figure has complete freedom of action to achieve goals that he or she has articulated through a careful process of rational analysis involving full and objective study of all pertinent information and alternatives.)

- 2) Pada saat yang sama, diasumsikan bahwa aktor utama memegang kendali penuh atas aparatur pemerintah sehingga suatu keputusan yang diambil sama baiknya dengan pelaksanaannya.

(At the same time, it presumes that this central actor is so fully in control of the apparatus of government that a decision once made is as good as implemented.)

- 3) Dari perspektif teori pilihan rasional, setiap model aktor rasional mengasumsikan bahwa aktor (pembuat keputusan) membuat pilihan yang diyakini akan mengarah pada hasil terbaik seperti yang didefinisikan oleh nilai atau preferensi pribadi mereka.¹¹

(From the perspective of rational choice theorists, any rational actor model assumes that actors (such as decision makers) make choices that the actors believe will lead to the best feasible outcomes for them as defined by their personal values or preferences.)

Sementara itu, pendekatan diplomasi yang dikembangkan oleh R.P. Barston¹³ dalam buku *Modern Diplomacy* (1991) juga relevan untuk memahami Diplomasi Mediasi dan Aksi Diplomasi AS dalam sengketa Irian Barat. Dalam pendekatan diplomasi, penyelesaian suatu sengketa melalui cara negosiasi, konsiliasi, arbirtasi, mediasi, dan hukum sehingga dihindari penyelesaian sengketa dengan kekerasan (perang). Diplomasi Mediasi terdiri unsur negosiasi, persuasi, dan represi. Dalam Diplomasi Mediasi, mediator punya peran strategis dan berfungsi menyerap aspirasi pihak-pihak yang bersengketa sebelum melakukan aksinya mediasi¹³.

Pihak mediator memperhatikan Prinsip-Prinsip Mediasi (PPM) dengan saksama. PPM memiliki variable-variabel sebagai berikut; 1) strategi adalah cara yang ditempuh oleh pihak yang bersengketa agar mediasi dapat mencapai tujuan dengan efektif; 2) proses adalah pelaksanaan mediasi yang dilakukan dengan fleksibel, bertahap, dan menunda jika mengalami kendala sampai dicapai kesepakatan; dan 3) solusi adalah rumusan

penyelesaian sengketa yang ditawarkan oleh mediator kepada pihak yang bersengketa.

Mediator melakukan fungsi mediasi dengan target yang tidak mudah dicapai. Mediator memiliki target mengubah sikap para pihak dari konflik menuju kompromi. Dalam membangun kesepakatan, tentu saja mediator tidak akan pernah memuaskan semua pihak. Kapasitas mediator dalam mencapai target diukur oleh kemampuannya mengubah empat variabel mediasi, yaitu persepsi, pendekatan, perilaku, dan tujuan. Dengan demikian, mediator adalah pihak yang dipercaya oleh yang bersengketa untuk mampu bersikap netral dan punya kapasitas¹⁴.

Selanjutnya, dari perspektif Sejarah Diplomasi, Christopher McMull¹⁵ dalam karyanya *Mediation of the West New Guinea Dispute* (1962) mengidentifikasi variabel internal dan eksternal dari masalah perubahan kebijakan AS dari pasif netral menjadi aktif mediasi dalam sengketa Irian Barat. Variabel internal perubahan kebijakan tersebut adalah dinamika pemikiran politik dan rekomendasi elite atas sengketa Irian Barat di dalam negeri AS dan variabel eksternalnya adalah dinamika politik internasional khususnya potensi perluasan pengaruh Soviet ke Indonesia dan peningkatan eskalasi sengketa Irian Barat.

III. PERGESERAN POLA KEBIJAKAN LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT DAN IMPLIKASINYA

Latar belakang sengketa Irian Barat tidak bisa dipisahkan dari kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Dalam pasal 2 ayat 6 kesepakatan KMB 1949, dijelaskan bahwa karena kondisi yang sudah tidak kondusif untuk dilanjutkan maka keberadaan Irian Barat ditetapkan dalam keadaan *status quo*¹⁶. Naskah kesepakatan ini juga mengatur status politik wilayah ini, dibicarakan setahun setelah KMB 1949 dalam kerangka Uni Indonesia-Belanda. Sesuai dengan kesepakatan pada tahun 1950, dilakukan perundingan di Jakarta dan Den Haag, tetapi kedua negara gagal mencapai kesepakatan¹⁷.

Akibat dari kegagalan karena diplomasi bilateral pada tahun 1954, Indonesia melakukan diplomasi multilateral sengketa Irian Barat ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam forum Sidang Umum PBB (SU PBB), Indonesia masih sulit memperjuangkan isu dekolonialisasi Irian Barat melawan Belanda yang mengangkat isu hak menentukan nasib sendiri. Salah satu penyebabnya adalah AS sebagai negara yang sangat berpengaruh melaksanakan kebijakan pasif netral yang implisit, berpihak kepada Belanda. Baru pada SU PBB tahun 1961, AS mengubah kebijakannya atas Irian Barat dari kebijakan pasif netral menjadi kebijakan aktif mediasi. AS mendorong Belanda dan Indonesia ke meja perundingan setelah menyetujui usul dari kelompok Brazzaville (negara-negara Afrika).

Presiden AS memiliki posisi strategis dalam kebijakan luar negeri¹⁸. Pergantian Presiden AS dari Dwight D. Eisenhower (1953–1961) kepada John F. Kennedy (1961–1963) berimplikasi kepada perubahan kebijakan AS atas sengketa Irian

Barat. Latar belakang karier Presiden Eisenhower pada Perang Dunia ke-2 adalah panglima tertinggi Angkatan Darat di Eropa sehingga berorientasi ke Eropa dan pro-Belanda dalam sengketa Irian Barat. Selanjutnya, latar belakang ideologi Partai Republik sebagai pendukung Eisenhower merefleksikan eksistensi AS sebagai negara adidaya, memiliki supremasi militer, dan menjadi “polisi dunia.” Jadi, untuk menjaga eksistensinya sebagai negara adidaya, AS memupuk solidaritas dengan sekutu Eropa, termasuk Belanda. Akibat dari perbuatan tersebut, Eisenhower lebih memilih kebijakan netral pasif dalam sengketa Irian Barat yang implisit berpihak kepada Belanda.

Dalam latar belakang karier, Presiden Kennedy adalah seorang politisi (anggota kongres 1952–1960) dan tidak memiliki orientasi ke Eropa serta bebas dari kepentingan Belanda. Latar belakang ideologi Partai Demokrat membuat kebijakan Kennedy lebih merefleksikan nilai-nilai Amerika; demokrasi, kebebasan, hak-hak individu, dan kemerdekaan. Akibatnya bagi Kennedy, mendukung dekolonialisasi Irian Barat dipandang bagian dari kepentingan nasional AS karena bersinergi dengan nilai-nilai Amerika (kemerdekaan), di mana nilai-nilai ini tercantum pada Deklarasi Kemerdekaan 1776. Selain itu, di era kepemimpinan Kennedy, eskalasi Perang Vietnam sedang meningkat sehingga memerlukan perhatian khusus dan sengketa Irian Barat yang berlarut-larut membuat konsentrasi AS terbagi.

Jadi, latar belakang karier, ideologi, dan perkembangan politik Asia Tenggara memengaruhi kebijakan Presiden Eisenhower dan Kennedy terhadap sengketa Irian Barat. Berbagai kondisi ini mendorong perubahan kebijakan AS dari netral pasif menjadi aktif mediasi walaupun mengorbankan hubungan bilateralnya dengan Belanda.

Oleh karena itu, pada tahun 1961 terjadi perubahan kebijakan AS dalam sengketa Irian Barat dari netral menjadi aktif

mediasi. Perubahan kebijakan ini dilanjutkan dengan diplomasi mediasi dan aksi mediasi dalam sengketa Irian Barat⁷, di mana di dalamnya terkandung unsur-unsur, yaitu persuasi, negosiasi, dan represi⁴. Perubahan kebijakan ini terjadi karena AS berkepentingan mencegah sengketa Irian Barat agar tidak berkembang menjadi perang terbuka. Melalui perubahan kebijakan ini, AS punya peluang menyelesaikan sengketa tersebut melalui diplomasi mediasi agar sengketa tersebut tidak menjadi jalan masuk pengaruh Uni Soviet ke Indonesia.

Dari hasil kajian literatur, diketahui bahwa perubahan kebijakan AS memiliki dua faktor, yakni faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah beberapa peristiwa dalam negeri AS yang memengaruhi pengambilan keputusan atas sengketa Irian. Peristiwa tersebut, antara lain pertemuan Howard P. Jones dengan Presiden Kennedy pada 25 Januari 1961, yang melaporkan bahwa Uni Soviet telah memberi bantuan militer kepada Indonesia. Oleh karena itu, Jones merekomendasi agar AS meninjau kebijakan netral AS atas sengketa Irian Barat untuk mengimbangi pengaruh Uni Soviet.

Pernyataan Averell W. Harriman, pejabat baru Deputy Menteri Luar Negeri urusan Timur Jauh, bahwa sebaiknya AS punya peran dalam sengketa Irian Barat⁴. Upaya George C. McGee, Kepala Unit Litbang Kemlu mewacanakan agar AS menempuh kebijakan aktif mediasi dalam sengketa Irian Barat (*Active Mediation Policy*) demi mengimbangi pengaruh Uni Soviet di Indonesia. Penyampaian memorandum Robert W. Komer, anggota Dewan Keamanan Nasional, pada 19 April 1961 yang berisi analisis kemenangan Indonesia atas Belanda dalam sengketa Irian Barat dan mendorong perubahan kebijakan

AS karena kepentingan strategis AS direkomendasi berpihak kepada Indonesia⁷.

Meskipun demikian, di kalangan elite AS terjadi konflik atas wacana perubahan kebijakan ini. Wacana agar AS berperan membantu penyelesaian sengketa Irian Barat ditolak oleh sebagian elite politik. Mereka yang menolak perubahan kebijakan AS atas sengketa Irian Barat, antara lain John F. Dulles dan Allen F. Dulles. Dean Rusk pada mulanya menolak Kebijakan Aktif Mediasi ini, tetapi kemudian mendukung. Elite lain yang menolak kebijakan ini adalah George Ball, Adlai Stevenson, dan Harlan Cleveland¹⁴.

Sementara itu, di kongres yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)²¹ juga terjadi penolakan atas rencana perubahan kebijakan AS. Anggota Senat yang keberatan dengan gagasan ini, antara lain Senator Dold dengan alasan Indonesia berpotensi menjadi komunis. Anggota DPR dari Partai Republik, William S. Broomfield, juga menolak kebijakan ini karena tidak menyukai Soekarno yang menurutnya arogan¹⁴. (*Dijelaskan dalam lampiran 1*)

Sementara itu, strategi yang disiapkan oleh Presiden Kennedy dalam mewujudkan kebijakan ini adalah kebijakan kombinasi antara komunikasi politik, persuasi politik²² dan pembaruan, dengan penjelasan sebagai berikut.

- 1) Persuasi, Presiden Kennedy melakukan bipartisan politik dengan melakukan pendekatan kepada William Fulbright, Ketua Komisi Urusan Luar Negeri Senat. Dia berharap agar para senator di Kongres AS mendukungnya.
- 2) Pembaruan pejabat di Kemlu, Presiden Kennedy mengganti pejabat yang tidak sejalan dengan dirinya untuk memperlancar kebijakan AS yang baru atas sengketa Irian Barat, dalam hal ini Kebijakan Aktif Mediasi¹⁴.

Di lain pihak, terdapat beberapa peristiwa sebagai faktor eksternal perubahan kebijakan AS atas sengketa Irian Barat. Dari segi variabel eksternal, antara lain kegagalan diplomasi Indonesia ke AS yang terobati oleh keberhasilan diplomasi ke Uni Soviet. Pada 20 Desember 1960, ditandatangani nota kerja sama yang intinya Uni Soviet memberi bantuan militer kepada Indonesia. Bantuan militer ini menjadi tumpuan Indonesia perang menghadapi Belanda di Irian Barat. Bantuan itu punya makna bahwa kebijakan luar negeri Indonesia mendekati Uni Soviet. Di lain pihak, bantuan militer Uni Soviet ini memperkuat pengaruh Partai Komunis Indonesia (PKI) di Indonesia dan salah satu implikasinya adalah terjadi nasionalisasi atas perusahaan-perusahaan milik Belanda.

Peristiwa lain yang juga merupakan variabel eksternal dari perubahan kebijakan AS adalah pengumuman Trikora oleh Presiden Soekarno pada 19 Desember 1961. Trikora menjadi indikasi Indonesia sudah siap menyerbu Irian Barat setelah mendapat bantuan militer Uni Soviet. Indikasi ini dilihat dari butir-butir Trikora sebagai berikut: 1) Gagalkan berdirinya negara boneka Papua; 2) Kibarkan Sang Saka Merah Putih di Irian Barat; dan 3) Siap untuk mobilisasi umum⁴.

IV. MODEL MEDIATOR RASIONAL: FUSI MODEL AKTOR RASIONAL DAN PRINSIP-PRINSIP MEDIASI

Masalah perubahan kebijakan Amerika Serikat (AS) dalam sengketa Irian Barat menjadi laboratorium sejarah diplomasi dan mediasi karena memiliki fakta-fakta historis yang mengandung nilai-nilai praktik diplomatik maupun akademik. Memahami fakta-fakta tersebut melalui sejumlah konsep yang relevan menjadi inspirasi untuk mengembangkan model mediasi yang komprehensif. Dalam hal ini, perubahan kebijakan tersebut dipahami melalui Model Aktor Rasional (MAR). Hal ini dilanjutkan dengan Diplomasi Mediasi (DM) yang mengandung unsur persuasi, negosiasi, dan represi. Lalu, hal ini dilanjutkan dengan aksi mediasi yang memperhatikan Prinsip-Prinsip Mediasi (PPM), yakni strategi, proses, dan solusi. Rasionalisme cenderung realistik²³ sehingga MAR memahami perubahan kebijakan AS atas sengketa Irian Barat dengan merujuk pada beberapa variabel, yaitu kondisi objektif, tujuan kebijakan, opsi kebijakan, risiko untung-rugi, dan pilihan terbaik, seperti penjelasan berikut ini.

4.1 Kondisi Objektif Sengketa Irian Barat: Peluang dan Kendala Amerika Serikat (*Threats and Opportunities*)

AS memiliki peluang untuk melakukan kebijakan aktif mediasi atau mendorong perundingan antara Belanda dan Indonesia dalam sengketa Irian Barat karena memiliki pengaruh kepada kedua negara tersebut. Oleh karena itu, pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SU PBB) tahun 1961, Duta Besar AS di PBB, Jonathan Bingham, mendukung usul negara-negara

Afrika (Brazzaville) agar Belanda dan Indonesia melakukan perundingan dalam sengketa Irian Barat.

Meski demikian, AS juga memiliki kendala untuk mendukung perundingan tersebut. Kendala tersebut adalah AS akan berhadapan dengan Belanda yang cenderung bersikap *status quo*. Di lain pihak, Belanda merupakan sekutu AS dalam Perang Dunia ke-2 sekaligus sekutunya dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara (*The North Atlantic Treaty Organization*).

4.2 Tujuan Perubahan Kebijakan Amerika Serikat (*The State's Goals*)

Secara umum, tujuan kebijakan luar negeri AS di era Kennedy adalah kerja sama mencegah konflik regional maupun lokal¹⁴. Kennedy juga bertujuan ingin memperbaiki citra AS di negara berkembang. Hal ini disebabkan citra AS di era Eisenhower kurang baik di negara berkembang karena bersikap represif jika ada negara yang tidak sejalan dengannya. Sejalan dengan hal tersebut, tujuan kebijakan aktif mediasi AS di era Kennedy mencegah konflik Belanda dan Indonesia menjadi perang terbuka agar tidak menjadi pintu masuk pengaruh Uni Soviet ke Indonesia.

4.3 Pilihan Objektif Kebijakan AS terhadap Sengketa Irian Barat (*Options for Addressing This Issue*)

Terdapat tiga pilihan rasional yang dimiliki oleh AS dalam merespons sengketa Irian Barat, yaitu AS bersikap netral seperti yang dilakukan selama di bawah Presiden Dwight Eisenhower, AS mendukung *the Luns Plan* Irian Barat di bawah pengawasan PBB, diberlakukan resolusi 1514 (XV), dan AS mendukung pe-

rundingan atau melakukan peran mediasi dalam konflik sengketa Irian Barat¹⁴.

4.4 Risiko dan Manfaat Strategis dari Setiap Opsi (*Strategic Cost and Benefits of Each Option*)

Risiko dari opsi ke-1, yaitu AS netral dalam sengketa Irian Barat, merupakan hubungan bilateral AS-Indonesia memburuk karena sikap netral AS ditafsirkan oleh Indonesia sebagai sikap pro Belanda. Manfaat strategis dari opsi ke-1 atau netral adalah hubungan bilateral AS dengan Belanda tetap terpelihara baik.

Opsi ke-2 adalah AS mendukung *the Luns Plan*. Risiko yang harus ditanggung dari opsi ke-2 adalah Indonesia mendekati ke Uni Soviet, terjadi perang terbuka, dan Indonesia jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet (komunis). Manfaat strategis dari opsi ke-2 ini adalah kerja sama AS-Belanda semakin kokoh.

Opsi ke-3 adalah AS memainkan peran mediasi antara Belanda dan Indonesia. Peran mediasi ini punya risiko hubungan bilateral Belanda-AS terancam memburuk karena Belanda mencurigai AS di era Kennedy berpihak kepada Indonesia dalam sengketa Irian Barat. Manfaat strategis dari opsi ke-3 bahwa peran mediasi AS mencegah perang terbuka dan mencegah pengaruh Uni Soviet ke Indonesia¹⁴.

4.5 Pilihan Terbaik Kebijakan Amerika Serikat terhadap Sengketa Irian Barat (*The Best Choice Gives These Conditions*)

Sejarah mencatat bahwa pilihan terbaik AS dari tiga alternatif pilihan kebijakan adalah pilihan ke-3, yaitu kebijakan mendukung perundingan atau melaksanakan kebijakan mediasi dalam sengketa Irian Barat. Hal ini sesuai dengan tujuan kebijakan luar negeri AS, yaitu meredakan konflik lokal dan regional, sejalan

dengan rekomendasi pejabat di pemerintahan, dan mendukung kepentingan strategisnya. (*Dijelaskan dalam lampiran 2*).

Dengan demikian, kerangka analisis MAR telah membantu dalam memahami proses Pengambilan Keputusan di atas yang mengantarkan Presiden Kennedy kepada opsi ke-3, yaitu AS melaksanakan kebijakan aktif mediasi. Selanjutnya, keputusan tersebut diperkuat oleh asumsi-asumsi Model Pilihan Rasional (MPR) yang memiliki asumsi-asumsi sebagai berikut:

- 1) Presiden Kennedy memiliki kebebasan menetapkan kebijakan AS yang diyakini benar dan sejalan dengan kepentingan nasional;
- 2) Presiden Kennedy memiliki kontrol atas sikap aparatur pemerintahan dan implementasi kebijakan terkait dengan sengketa Irian Barat. Kontrol Presiden Kennedy ini dibuktikan dengan sikap Menteri Luar Negeri Dean Rusk yang semula menentang, akhirnya mendukung kebijakan aktif mediasi; dan
- 3) Presiden Kennedy dalam mengambil keputusan dipengaruhi oleh nilai-nilai pribadi dan preferensinya. Seperti umumnya Presiden dari Partai Demokrat, Kennedy lebih peduli pada nilai-nilai Amerika, seperti kebebasan, kemerdekaan, persamaan, hak-hak asasi manusia, dan kebahagiaan. Nilai-nilai Amerika ini bersinergi dengan upaya dekolonialisasi yang dilakukan Indonesia atas Irian Barat.

Setelah memilih kebijakan aktif mediasi dalam sengketa Irian Barat, AS melakukan Diplomasi Mediasi. AS melakukan Diplomasi Mediasi bersandar pada variabel persuasi, represi, dan negosiasi. Hal ini dilanjutkan dengan Aksi Diplomasi yang bersandar pada beberapa variabel, yaitu strategi, proses, dan solusi agar target mediasi tercapai. Target mediasi adalah mengubah persepsi, pendekatan, perilaku, dan tujuan dari Belanda dan

Indonesia. Sebagai mediator, AS dipercaya oleh Belanda dan Indonesia sehingga berhasil mengelola perbedaan kepentingan dan berhasil mencapai Perjanjian New York tahun 1962⁴.

Dalam rangka diplomasi mediasi, pada Januari 1962, Presiden Kennedy mengutus Robert Kennedy ke Indonesia dan Belanda. Robert Kennedy membawa misi bahwa AS ingin menjadi mediator dalam sengketa Irian Barat. Dalam Diplomasi Mediasi ini, AS menekankan Prinsip-Prinsip Mediasi, yaitu

- 1) Pertama, Robert Kennedy mengharapkan bahwa strategi mediasi adalah perundingan tanpa syarat, bersifat tertutup, dan bersifat informal.
- 2) Kedua, proses mediasi berlangsung secara bertahap dan dinamis dari Maret sampai dengan Agustus 1962. Dalam sejarah, tercatat perundingan berlangsung dalam dua putaran, yaitu pertama 20–22 Maret 1962 dan kedua 13–14 Juli 1962.
- 3) Ketiga, solusi dalam mediasi adalah *Bunker Plan 1*, *Bunker Plan 2*, dan bermuara kepada Perjanjian New York 1962⁴. (Dijelaskan dalam lampiran 3)

Jadi, upaya memahami perubahan kebijakan AS dalam sengketa Irian Barat adalah untuk memperoleh pengertian atas fenomena tersebut. Hal tersebut dilakukan melalui perspektif historis-evolusi dan pendekatan empirisme, yaitu dengan memahami fakta-fakta sejarahnya. Pendekatan empiris berpijak pada asumsi dasar bahwa pengalaman adalah sumber valid dalam membangun konsep atau pengertian²⁴. Empirisme memanfaatkan observasi atas perilaku sebagai jalan untuk mencapai pengertian. Historis-evolusi dan empirisme diawali dengan pengumpulan catatan pengalaman (fakta-fakta) khusus dan informasi yang selanjutnya ditarik kesimpulan dengan metode induksi untuk menuju kepada pengertian umum.

Dengan demikian, observasi perilaku melahirkan impresi yang dikombinasikan dengan pengertian yang lebih kompleks

dengan memperhatikan prinsip asosiasi, yaitu keserupaan, kedekatan, dan kausalitas. Observasi juga melalui perbandingan dan kombinasi dari suatu pengertian atau konsep yang sudah ada guna membangun konsep baru (kebaruan). Setelah observasi dilakukan, kontemplasi dan penarikan kesimpulan secara induksi atas pengertian atau konsep sederhana menuju pengertian atau konsep yang lebih kompleks. Kontemplasi dan dialektika atas pengertian, konsep, atau tesis menghasilkan sintesis. Hal ini pada dasarnya merupakan fusi dari dua konsep atau pengertian yang melahirkan konsep baru (kebaruan).

Oleh karena itu, observasi historis-evolusi berpijak pada masalah perubahan kebijakan AS atas sengketa Irian Barat dari pasif netral menjadi aktif mediasi. Perubahan ini diidentifikasi memiliki dua faktor, yaitu internal dan eksternal. Perubahan kebijakan ini dipahami lebih mendalam melalui MAR sehingga juga dipahami proses dan kompleksitasnya dalam pengambilan keputusan.

Setelah melakukan perubahan kebijakan, AS melakukan diplomasi mediasi dan Aksi Mediasi dengan memperhatikan PPM. Setelah memahami proses perubahan kebijakan yang merujuk pada MAR dan Aksi Mediasi yang merujuk pada PPM, penulis melakukan kontemplasi dan fusi atas model atau konsep yang dikaji guna menyusun pengertian baru, yakni model manajemen mediasi komprehensif yang disebut MMR. Jadi, memahami perubahan kebijakan AS atas sengketa Irian Barat melahirkan MMR yang merupakan pengertian atau konsep baru (kebaruan) dalam fungsi mediasi yang bercirikan manajemen mediasi komprehensif karena hasil fusi (sintesis) dari MAR dan PPM.

Model Mediator Rasional (MMR) adalah refleksi dari sejarah pengambilan keputusan dan sejarah mediasi AS dalam kasus sengketa Irian Barat antara Belanda dan Indonesia. Meski

demikian, MMR dapat digunakan sebagai kerangka analisis oleh negara atau institusi lain yang ingin melakukan mediasi terhadap kasus pada ruang dan waktu yang berbeda, sejauh asumsi-asumsi dalam MMR terpenuhi. MMR terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap Pra-Mediasi dan tahap Aksi Mediasi. Tahap Pra-Mediasi maupun Aksi Mediasi masing-masing mempunyai asumsi-asumsi yang menjadi rujukan untuk memahami prospek mediasi atas suatu sengketa. Jadi, MMR akan membimbing mediator sebelum dan saat mediasi berlangsung. Sebelum mediasi atau tahap Pra-Mediasi, akan dibimbing oleh MAR untuk mengambil keputusan dalam memilih melakukan atau tidak melakukan mediasi dan membimbing mediator saat melakukan Aksi Mediasi dengan PPM.

MMR, dalam melaksanakan mediasi, melakukan persiapan yang disebut tahap Pra-Mediasi. Dalam konsep MMR, tahap Pra-Mediasi adalah suatu masa di mana rencana kebijakan mediasi dikaji dan dinilai rasional jika sudah dianalisis melalui skema MAR. Dalam konsep MMR, skema MAR didasarkan pada asumsi bahwa suatu kebijakan mediasi perlu dilaksanakan atau tidak perlu dilaksanakan setelah mempertimbangkan beberapa variabel, yaitu kondisi objektif (peluang dan kendala), tujuan kebijakan, opsi-opsi dari kebijakan, risiko dari kebijakan, dan pilihan terbaik untuk menjadi suatu kebijakan (Pra-Mediasi=MAR/V.KOTOROP).

Dalam MMR, ketika mediator memasuki tahap aksi, mediasi harus memperhatikan PPM. Dalam manajemen mediasi, diyakini asumsi dasar bahwa suatu aksi mediasi akan sukses jika mediator mempersiapkan variabel mediasi dengan baik, yaitu strategi, proses, dan solusi (AM=PPM/V.SPS) yang diterima pihak yang berkonflik. Asumsi berikutnya bahwa PPM diterima oleh pihak yang bersengketa, tergantung netralitas dan pengaruh (*power*)

mediator (PPM->X=V.NP). Oleh karena itu, asumsi berikutnya dalam MMR bahwa eksistensi pengaruh (*power*) punya korelasi dengan efektifitas mediator dalam mediasi (MMR=P<->E). Jadi, asumsi berikutnya, semakin besar pengaruh (*power*) mediator maka mediasi semakin efektif. Sebaliknya, semakin kecil pengaruh (*power*) mediator maka mediasi semakin tidak efektif ($P > E, P < TE$)^{13,14}.

Asumsi berikutnya dari MMR bahwa pengaruh (*power*) mediator dalam melakukan mediasi diukur dengan indikator kemampuan mengubah sejumlah variabel, yaitu persepsi, pendekatan, perilaku, dan tujuan (IP-V.P3T) dari pihak yang berkonflik. Jika mediator mampu melakukan perubahan atas beberapa variabel tersebut, mediator dinilai punya pengaruh (*power*) atas pihak yang berkonflik. Sebaliknya, seandainya mediator tidak mampu melakukan perubahan variabel-variabel tersebut, mediator dinilai tidak memiliki pengaruh (*power*) di hadapan yang berkonflik.

Asumsi-asumsi di atas disederhanakan dalam formula sebagai berikut:

- 1) Asumsi 1-Pra-Mediasi (PM=MAR/V.KOTOROP). Pra-Mediasi adalah tahap untuk menentukan pilihan kebijakan melalui skema Model Aktor Rasional didasarkan pada variabel kondisi objektif, tujuan, opsi-opsi, risiko, dan opsi pilihan.
- 2) Asumsi 2-Aksi Mediasi (AM= PPM/V.SPS). Aksi Mediasi merupakan tahap pelaksanaan mediasi di mana sukses atau gagalnya ditentukan oleh implementasi Prinsip-Prinsip Mediasi, yaitu variabel strategi, proses, dan solusi.
- 3) Asumsi 3 (PPM->X=V.NP). Prinsip Prinsip Mediasi bisa diterima oleh yang berkonflik jika mediator bersikap netral dan punya pengaruh.

- 4) Asumsi 4 ($MMR=P \leftrightarrow E$). Dalam Model Mediator Rasional pengaruh (*power*) punya korelasi dengan efektivitas mediasi.
- 5) Asumsi 5 ($P > E, P < TE$). Semakin besar pengaruh mediator maka semakin efektivitas mediasi, semakin kecil pengaruh mediator maka semakin kurang efektif mediasi.
- 6) Asumsi 5 (IP-V.P3T). Indikator pengaruh mediator ditentukan oleh kemampuan mengubah persepsi, pendekatan, perilaku, dan tujuan pihak yang berkonflik.

(Dijelaskan dalam lampiran 4)

V. MODEL MEDIATOR RATIONAL DAN POSISI INDONESIA SEBAGAI NEGARA KEKUATAN MENENGAH

Model Mediator Rasional (MMR) mendukung peran Indonesia sebagai negara kekuatan menengah. Negara kekuatan menengah punya peran strategis dalam politik internasional, yaitu penjaga perdamaian, mediator konflik, dan komunikator para pihak²⁵. Berdasarkan catatan sejarah, Indonesia pernah berperan sebagai mediator sengketa internal negara lain maupun sengketa antarnegara. Misalnya saja, Indonesia menjadi Ketua Bersama dengan Prancis dalam penyelesaian konflik Kamboja. Keduanya menjadi ketua perundingan damai dalam konflik Vietnam dengan Kamboja pada tahun 1988–1989. Upaya damai ini menghasilkan Pertemuan Jakarta Informal (*Jakarta Informal Meeting*) yang mengatur gencatan senjata dan Perjanjian Damai Paris (*Paris Peace Agreement*) yang mengakhiri perang antara Vietnam dan Kamboja.

Dengan memanfaatkan MMR maka Pemerintah Indonesia dibekali oleh manajemen mediasi yang komprehensif. Pertama, MMR dalam masa Pra-Mediasi dilaksanakan proses pengambilan keputusan yang didasarkan pada Model Aktor Rasional (MAR). Oleh karena itu, proses dan hasilnya bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik dalam menentukan suatu kebijakan. Kedua, MMR dilengkapi oleh Prinsip-Prinsip Mediasi (PPM), yaitu strategi, proses, dan solusi dan memiliki target perubahan pola pikir, persepsi, perilaku, dan tujuan dari pihak-pihak yang bersengketa dengan cara terukur.

Dengan menggunakan MMR, mediator (pemerintah) dapat menjelaskan atas opini publik yang berpandangan bahwa kebijakan mediasi yang dilakukan terkesan kontroversi atau terkesan

“tebang pilih”. Dalam hal ini, mediator dapat merespons opini publik tersebut dengan menjelaskan latar belakang kebijakan mediasi yang ditempuh atau tidak ditempuh sesuai dengan skema MMR pada masa yang bisa dipertanggungjawabkan secara saintifik.

VI. KESIMPULAN

Kesimpulan ini mengonfirmasi bahwa masalah perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat (AS) dalam sengketa Irian Barat dari pasif netral menjadi aktif mediasi dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah rekomendasi para elite dan pergantian pejabat di era Presiden Kennedy. Faktor eksternal adalah meningkatnya eskalasi konflik Irian Barat pada awal tahun 1962 sehingga berpotensi menjadi perang terbuka dan masuknya pengaruh Uni Soviet ke Indonesia.

Kesimpulan ini juga mengukuhkan keyakinan bahwa Model Aktor Rasional (MAR) dan Model Pilihan Rasional (MPR) adalah konsep yang relevan untuk memahami pengambilan keputusan yang menghasilkan perubahan kebijakan AS dalam sengketa Irian Barat. MAR memiliki beberapa variabel, yaitu kondisi objektif, tujuan kebijakan, opsi kebijakan, risiko untung-ruginya, dan pilihan terbaik. MAR dilanjutkan dengan Diplomasi Mediasi yang memiliki unsur persuasi, represi, negosiasi, dan Aksi Mediasi yang memiliki variabel strategi, proses, solusi, dan memiliki target untuk mengubah persepsi, pendekatan, tujuan, dan perilaku. Diplomasi Mediasi mendorong kepada perundingan di Middleburg sampai akhirnya tercapai Perjanjian New York 1962 yang mengakhiri sengketa Irian Barat²⁶.

Akhinya, studi historis-evolusi atas perubahan kebijakan dan peran mediasi AS dalam sengketa Irian Barat ini berhasil merumuskan konsep Model Mediator Rasional (MMR) yang punya dimensi kebaruan. MMR merupakan model mediasi konflik yang berciri komprehensif dan bisa diimplementasikan pada ruang dan waktu yang berbeda sejauh asumsi-asumsinya terpenuhi. Model manajemen mediasi ini dinilai komprehensif

karena dilengkapi oleh dua skema analisis, yaitu skema analisis Pra-Mediasi, yakni MAR sebagai rujukan memahami proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan, dan skema Aksi Mediasi, yakni Prinsip-Prinsip Mediasi (PPM) sebagai rujukan dalam melakukan fungsi mediator dalam suatu sengketa.

VII. PENUTUP

Amerika Serikat (AS) merupakan negara adidaya sehingga dampak kebijakan politiknya perlu diantisipasi. Kebijakan AS terhadap Irian Barat, atau sekarang dikenal dengan Papua, perlu dipantau mengingat adanya investor AS di sana, yaitu PT Freeport. Permasalahan sebagian rakyat Papua atau Kelompok Kriminal Bersenjata menjadikan perusahaan AS ini sebagai target gangguan keamanan. Padahal AS adalah negara yang sangat sensitif terhadap gangguan keamanan atas warga dan investasinya di luar negeri. Oleh karena itu, keamanan warga dan investasi punya nilai strategis dalam hubungan bilateral AS-Indonesia.

Kajian tentang kebijakan luar negeri AS sudah waktunya dikembangkan di lingkungan universitas atau lembaga riset di Indonesia. Hal ini perlu dilakukan agar dampak kebijakan globalnya tidak merugikan kepentingan nasional. Sebaliknya, justru Indonesia perlu punya kemampuan membangun strategi diplomasi yang dapat mengubah potensi konflik menjadi potensi kerja sama dengan AS.

UCAPAN TERIMA KASIH

Sebagai akhir dari orasi ini, izinkan saya mengucapkan syukur kepada Allah Swt., Tuhan Semesta Alam. Berkat kasih sayang dan kehendak-Nya-lah, naskah orasi ini dapat saya selesaikan dan persembahkan kepada para hadirin. Selanjutnya, perkenankan saya dari lubuk hati yang paling dalam mengucapkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam perjalanan karier saya sebagai peneliti hingga meraih gelar Profesor Riset.

Saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, Ir. H. Joko Widodo; Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Dr. Laksana Tri Handoko M.Sc.; Ketua Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Bambang Subiyanto, M.Agr.; Sekretaris Majelis Pengukuhan Profesor Riset, Prof. Dr. Ir. Gadis Sri Haryani, DEA.; Plt. Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas, S.IP., M.A.; Kepala BOSDM BRIN, Ratih Retno Wulandari, M.Si.; dan khususnya Tim Penelaah Naskah Orasi Ilmiah, yaitu Prof. Dr. Dewi Fortuna Anwar, M.A.; Prof. Dr. Tri Nuke Pudji Astuti, M.A.; dan Prof. Dr. Tirta Nugraha Mursitama, Ph.D. Saya juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Prof. Dr. Ahmad Najib Burhani, M.A. selaku Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora BRIN; Prof. Dr. Tri Nuke Pudjiastuti, M.A. selaku Deputy IPSK terdahulu di LIPI; Prof. Dr. Firman Noor, M.A. selaku Kepala Pusat Riset Politik BRIN terdahulu; dan Dr. Athiqah Nur Alami, S.IP., M.A. atas dukungan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan orasi ilmiah ini.

Selanjutnya, ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada para senior yang telah menginspirasi, yakni Prof. Dr. Mochtar Pabottingi; Prof. Dr. Ikrar Nusa Bhakti, M.A.; Prof. Dr. Indria

Samego, M.A.; dan Prof. Dr. Syamsuddin Haris, M.Si. serta rekan-rekan sejawat tempat berdialog dan bertukar pikiran yang tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada kedua orang tua, yaitu Alm. Hartono bin Sahir dan Almh. Rusmini binti Palib, adik saya Sri Hartuti, serta mertua saya Alm. Zainun Sutan Radjo Mudo bin Marakatun dan Almh. Hj. Aminah bin Radjobilang atas segala doa dan pengorbanan yang telah diberikan. Saya juga sampaikan ucapan terima kasih kepada istri, yaitu Etna Yuniza; dan anak-anak tercinta, yaitu Ibnu Wicaksono dan Aqmarina Mahadibya; menantu, Sahid Wijaya; dan cucu tersayang, Arsene Zoran Wajaya atas doa dan dukungannya. Semoga Allah Swt. membalas segala amal dan kebajikannya.

Terakhir, terima kasih saya sampaikan kepada panitia penyelenggara Orasi Pengukuhan Profesor Riset dan hadirin atas dukungannya sehingga acara ini dapat terselenggara dengan baik dan hikmat. Terima kasih atas perhatian para hadirin semua dan mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan dalam menyampaikan orasi ilmiah ini.

DAFTAR PUSTAKA

1. **Siswanto.** AS di bawah Donald Trump arah kebijakan nasional dan internasional. Dalam: Mashad D, editor. *Kontroversi kepemimpinan Donald Trump*. Bogor: Yayasan Gagas Nusantara Prima 2018; 77–122.
2. **Siswanto.** Tinjauan atas Perang Teluk Parsi jilid kedua. *Panca Arga Jurnal Akademi Militer Magelang* 2003; 6(4): 72–81.
3. **Siswanto.** Seratus hari kepemimpinan Donald Trump: Konsistensi dan orientasi. Dalam: Mashad D, editor. *Kontroversi Kepemimpinan Donald Trump*. Bogor: Yayasan Gagas Nusantara Prima 2018; 37–76.
4. **Siswanto.** Indonesia dan diplomasi Irian Barat 1949–1962: Memanfaatkan perang dingin. Jakarta: LIPI Press; 2020.
5. **Siswanto.** Opini politik masyarakat Amerika atas tindak kekerasan di Timor Timur pasca jajah pendapat dalam perspektif komunikasi politik internasional. 2000; 4(2): 89–93.
6. **Siswanto.** Bias media massa AS dan kemerdekaan Timor Timur. *Jurnal Penelitian Media dan Pendapat Umum* 2002; 6(2): 96–105.
7. **Siswanto.** Terobosan John F. Kennedy dalam kemelut Irian Barat. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2014.
8. **Siswanto.** Kebijakan dan Indonesia terhadap Timor Timur dalam perspektif containment policy. 1999; 5(8–12): 82–93.
9. **Siswanto.** Kepentingan geostrategi Amerika di Indonesia pada abad XXI. *Jurnal Kajian Wilayah Amerika* 2000; 4(1–7): 83–90.
10. Hudson V, M. The history and evolution of foreign policy analysis. Dalam: Smith F, Hadfield A, Dunne T, editor. *Foreign policy: Theories/actors/cases*. New York: Oxford University Press 2016; 13–34.

11. Graham A. The cuban missile crisis. Dalam: Smith F, Hadfield A, Dunne T, editor. *Foreign policy: Theories/actors/cases*. New York: Oxford University Press 2016; 263–290.
12. **Siswanto**. Rasionalitas dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap kepemilikan senjata nuklir Iran. *Buletin Lembah Tidar* 2006; 2(2): 34–41.
13. Barston RP. *Modern diplomacy*. London: Longman; 1991.
14. **Siswanto**. *Diplomasi Amerika Serikat dalam penyelesaian sengketa Irian Barat di masa Presiden John F. Kennedy*. Disertasi, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia, 2008.
15. McMull C. *Mediation of the West New Guinea dispute 1962*. Washington D.C.: Institute of the Study of Diplomacy; 1981.
16. **Siswanto**. *Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam sengketa Irian Barat 1949–1950: Sebuah kajian historis*. *Jurnal Penelitian Politik* 2005; 2(1): 11–28.
17. **Siswanto**. *Failure of bilateral diplomacy on Irian Barat*. *Journal of Indonesian Social Science and Humanities* 2018; 8(1): 23–38.
18. **Siswanto**. *Hubungan Indonesia-Amerika di masa Obama: Dari kerja sama anti teroris sampai penggalangan demokrasi*. *Jurnal Penelitian Politik* 2011; 8(2): 245–258.
19. **Siswanto**. *Kebijakan luar negeri Amerika dan reformasi di Indonesia*. *Jurnal Kajian Wilayah Amerika* 1999; 4(1): 153–167.
20. **Siswanto**. *Demonstrasi anti perang di AS sebagai upaya menekan kebijakan George W. Bush di Irak* 2003; 7(2): 93–104.
21. **Siswanto**. *Peningkatan filibuster dan masalah efisiensi pengambilan keputusan di Senat Amerika*. *Jurnal PSPP* 2000; 3(1): 73–84.
22. **Siswanto**. *Komunikasi AS politik AS-Indonesia: Studi kasus US election watch di Jakarta*. *Jurnal Penelitian Pers dan Pendapat Umum* 2001; 5(2): 94–108.
23. **Siswanto**. *Mencintai produk dalam negeri sebagai manifestasi bela negara di era global*. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 2017; 7(3): 85–105.

24. Bakker A. *Metode-metode Filsafat*. Jakarta: Ghalia Indonesia; 1984.
25. **Siswanto**. Peran dan posisi Indonesia sebagai middle power dalam kerja sama ekonomi multilateral dan regional, dalam Indonesia sebagai Middle Power dalam Perspektif Politik Ekonomi. Dalam: Sriyanto N, editor. Jakarta: P2P LIPI-Dipa 2019; 61–97.
26. **Siswanto**. *Dekolonialisasi versus status quo*. Bogor: Yayasan Gas Nusantara Prima; 2018.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Faktor dan Aktor Pengubah Kebijakan

Faktor	Aktor	Isi Rekomendasi	Penerima Rekomendasi	Penolak Kebijakan Aktif Mediasi
1. Faktor internal pejabat baru & rekomendasi	1. W. Averell Harriman., Deputi Menteri LN (Pejabat Baru)	1. Agar AS berperan dalam penyelesaian sengketa Irian Barat	1. Presiden Kennedy	1. George Ball, WK Menlu
2. Faktor eksternal eskalasi konflik Irian Barat & pengaruh Uni Soviet ke Indonesia	2. George. C. McGhee., Ketua Dewan Perencana Kebijakan LN	2. Mengusulkan kebijakan aktif mediasi	2. Dean Rusk, Menteri LN	2. Adlai Stevenson, Dubes AS untuk PBB
	3. Howard P. Jones, Duta Besar AS di Jakarta	3. AS perlu meninjau kebijakan netralnya	3. Presiden Kennedy	3. Harlan Cleveland, Deputi Menlu untuk organisasi internasional
	4. Robert W. Komer, Staf DKN	4. Karena kepentingan strategis, AS perlu berpihak kepada Indonesia	4. Walt Rostow, Staf Presiden Kennedy	4. Allen Dulles, Direktur CIA
5. Edward E. Rice, Diplomat senior dan peneliti	5. AS perlu mengubah kebijakan dalam sengketa Irian Barat	5. AS perlu mengubah kebijakan dalam sengketa Irian Barat	5. George C. McGhee, Ketua Dewan Perencana Kebijakan LN	5. William S. Broom Field, Anggota Kongres Partai Republik

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 2. Proses Pengambilan Keputusan (Menggunakan MAR-Model Aktor Rasional)

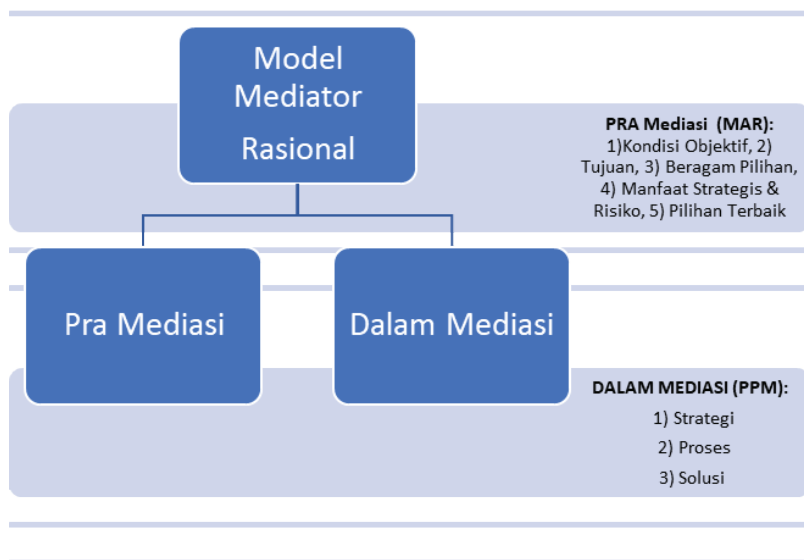
Kondisi Objektif	Tujuan	Beragam Pilihan	Manfaat Strategis & Risiko	Pilihan Terbaik
Peluang dukung perundingan karena AS punya pengaruh dan tantangan karena tidak sejalan dengan kepentingan Belanda.	Cegah perang terbuka dan pengaruh Uni Soviet ke Indonesia.	1. Netral 2. Dukung <i>Luns Plan</i> 3. Dukung perundingan	-Manfaat netral hubungan AS–Belanda. Baik risiko hubungan AS–RI buruk. -Manfaat dukung <i>Luns Plan</i> hubungan AS –Belanda. Baik risiko hubungan AS–RI buruk. Indonesia dekat ke Soviet (Kommunis). -Manfaat dukung perundingan, perang dapat dicegah, pengaruh Soviet ke Indonesia dapat ditekan, risiko hubungan AS–Belanda buruk.	Dukung perundingan sengketa Irian Barat.

Lampiran 3. Kebijakan Aktif Mediasi (Menggunakan PPM (Prinsip-Prinsip Mediasi))

Strategi	Proses	Solusi
Perundingan tanpa syarat, informal, dan tertutup	Bertahap, Maret–Agustus 1962 di Virginia dipimpin Ellsworth Bunker (Diplomat AS)	<i>Bunker Plan 1</i> <i>Bunker Plan 2</i> <i>Perjanjian New York</i>

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Lampiran 4. Skema Model Mediator Rasional (MMR)



DAFTAR PUBLIKASI ILMIAH

Buku

1. **Siswanto.** Terobosan John F. Kennedy dalam kemelut Irian Barat. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2014.
2. **Siswanto.** Kontroversi kepemimpinan Donald Trump. Bogor: Yayasan Gagasan Nusantara Prima; 2018.
3. **Siswanto.** Dekolonialisasi versus status quo. Bogor: Yayasan Gagasan Nusantara Prima; 2018.
4. **Siswanto.** Indonesia dan diplomasi Irian Barat 1949–1962: Memanfaatkan perang dingin. Jakarta: LIPI Press; 2020.

Bagian dari Buku

5. **Siswanto.** Pendekatan Politik Luar Negeri Indonesia: Bilateral atau Multilateral. Dalam: Irawati A, Kartini I. Potret politik luar negeri Indonesia di era reformasi Jakarta: YOI; 2019.
6. **Siswanto.** Hubungan Indonesia-Amerika di bawah kepemimpinan Donald Trump. Dalam: Politik Luar Negeri Indonesia terhadap Amerika Serikat: Mengelola Hubungan di Tengah Perubahan Tatanan Global. Yogyakarta: Suluh Media; 2018.
7. **Siswanto.** Seratus hari kepemimpinan Donald Trump. Dalam: Kontroversi Kepemimpinan Donald Trump. Bogor: Yayasan Gagasan Nusantara Prima; 2018.
8. **Siswanto.** Pemilu Presiden 2016 dan arah kebijakan luar negeri AS. Dalam: Kontroversi Kepemimpinan Donald Trump. Bogor: Yayasan Gagasan Nusantara Prima; 2018.
9. **Siswanto.** AS di bawah Donald Trump arah kebijakan nasional dan internasional. Dalam: Kontroversi Kepemimpinan Donald Trump. Bogor: Yayasan Gagasan Nusantara Prima; 2018.

10. **Siswanto** dan Kartini I. Relasi eksekutif-legislatif di Filipina, Amerika Serikat, dan Indonesia: Studi kasus pemakzulan. Dalam: Kartini I. Relasi eksekutif-legislatif. Jakarta: Mahara Publishing.
11. **Siswanto**, Ayu Novalissandhi, Bondan Widayatmoko, Kurnia Novianti. Czech policy on climate change and protection against flood. Dalam The knowledge of urban people in Prague: Responding flood as adaptation to climate change. Jakarta: PT Gading Inti Prima; 2014.
12. **Siswanto**. Strategi dan model perdagangan perbatasan di Kalimantan. Dalam: Rahman AR, editor. Kerja sama perdagangan perbatasan dan strategi ekonomi politik lokal. Jakarta: LIPI Press; 2015.
13. **Siswanto**, Kurnia Novianti, Fahmi Taftazani, Ayu Novalissandi. Policy of Prague Municipal Office on urban forest. Dalam Prague & Jakarta: Urban Forest Management as part of Sustainable City's Concept. Yogyakarta: Penerbit Ombak; 2015.
14. **Siswanto**, Novianti K, Novalissandhi A. Synergy cooperation in sustainable development among European Union, Czech Government and environmental EMOs. Jakarta: LIPI Press; 2010.
15. **Siswanto**. Kebijakan migrasi tenaga kerja dan persoalan pengelolaan remitansi dalam rangka pemberdayaan ekonomi buruh migran di Kabupaten Sumbawa. Dalam: Gusnelly, editor. Pemberdayaan ekonomi buruh migran di Nusa Tenggara Barat. Jakarta: PT Inti Gading Prima; 2012.
16. **Siswanto**. Tarik menarik kepentingan internasional dan domestik dalam isu-isu keamanan non-tradisional. Dalam: Alami N, editor. Politik luar negeri dan isu-isu keamanan non-tradisional. Yogyakarta: Calpulus; 2016.

Jurnal Internasional

17. **Siswanto**. Environmental policy in the Czech: Synergy cooperation among agencies. African Journal of Political Science and International Relations 2015; 9(7).

18. **Siswanto.** Failure of bilateral diplomacy on Irian Barat. *Journal of Indonesian Social Science and Humanities* 2018; 8(1).

Jurnal Nasional

19. **Siswanto.** Kebijakan luar negeri Amerika dan reformasi di Indonesia. *Jurnal Studi Amerika* 1999; 4(2): 153–167.
20. **Siswanto.** Demonstrasi antiperang di AS sebagai upaya menekan kebijakan George Bush di Irak. *Jurnal Pengkajian dan Pengembangan Informasi* 2003; 7(2): 93–104.
21. **Siswanto.** Sosok presiden ideal dan tantangan isu-isu global. *Jurnal Penelitian Politik* 2013; 10(2).
22. **Siswanto.** Perilaku media massa Amerika Serikat pada pemilihan presiden tahun 2016. *Jurnal Studi Komunikasi dan Media* 2018; 22(1).
23. **Siswanto.** Dinamika masyarakat Eropa dan globalisasi politik: Perspektif kajian wilayah. *Jurnal Kajian Wilayah* 2014; 5(1).
24. **Siswanto.** Opini politik masyarakat Amerika atas tindak kekerasan di Timor Timur pasca jajah pendapat dalam perspektif komunikasi politik internasional 2000; 4(2).
25. **Siswanto.** Kebijakan Amerika dan Indonesia terhadap Timor Timur dalam perspektif *containment policy*. *Jurnal Studi Amerika* 1999; 5(2).
26. **Siswanto.** Kepentingan geostrategi Amerika di Indonesia pada abad ke XXI. *Jurnal Studi Amerika* 2000; 6(1).
27. **Siswanto.** Bias media massa AS dan kemerdekaan Timor Timur. *Jurnal Penelitian Pers dan Pendapat Umum* 2002; 6(2): 96–105.
28. **Siswanto.** Aktualisasi Pancasila sebagai strategi menangkal perang proxy di Indonesia. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 2017; 7(1).
29. **Siswanto.** Nilai efisien dari serangan militer AS terhadap Afghanistan. *Jurnal Ilmiah Universitas Langlangbuana* 2002; 7(1).

30. **Siswanto.** Kepemimpinan Donald Trump dan turbulensi tatanan dunia. *Jurnal Penelitian Politik* 2018; 15(1).
31. **Siswanto.** Mencintai produk dalam negeri sebagai manifestasi bela negara di era global. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara* 2017; 7(3): 85–105.
32. **Siswanto.** Wajah multikulturalisme di Eropa: Ancaman atas kehidupan sosial politik imigran Muslim di Inggris. *Jurnal Kajian Wilayah* 2012; 3(2).
33. **Siswanto.** Peningkatan filibuster dan masalah efisiensi pengambilan keputusan di Senat. *Jurnal PSPP* 2000; 3(1): 73–84.
34. **Siswanto.** Tinjauan atas Perang Teluk Parsi jilid kedua. *Panca Arga Jurnal Akademi Militer Magelang* 2003; 6(4): 72–81.
35. **Siswanto.** Strategi teror di WTC dalam andangan Amerika. *Jurnal Kajian Masyarakat dan Budaya Amerika* 2002; 8(1).
36. **Siswanto.** Hubungan Indonesia-Amerika di masa Obama: Dari kerja sama antiteroris sampai pengalangan demokrasi. *Jurnal Penelitian Politik* 2011; 8(2).
37. **Siswanto.** Transformasi Pancasila dan identitas Keindonesiaan. *Jurnal Penelitian Politik* 2017; 14(1).
38. **Siswanto.** Diplomasi Belanda dan Indonesia dalam sengketa Irian Barat 1949–1950: Sebuah kajian historis. *Jurnal Penelitian Politik* 2005; 2(1): 11–28.
39. **Siswanto.** Mengkritisi isu Papua di Kongres Amerika Serikat. *Jurnal Penelitian Politik Year Book* 2005.
40. **Siswanto.** Menyimak kontroversi perubahan konstitusi Amerika Serikat. *Jurnal Kajian Masyarakat dan Budaya Amerika* 2002; 8(3).

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama	: Dr. Siswanto, M.Si.
Tempat/Tgl Lahir	: 26 Januari 1962
Anak ke	: Satu dari dua bersaudara
Jenis Kelamin	: Pria
Nama Ayah Kandung	: Alm. Hartono bin Sahir
Nama Ibu Kandung	: Almh. Rusmini binti Palip
Nama Isteri	: Etna Yuniza
Jumlah Anak	: 2 (dua)
Nama Anak	: (1) Ibnu Wicaksono (2) Aqmarina Mahadibya
Nama Instansi	: Pusat Riset Politik-BRIN
Judul Orasi	: Pengembangan Model Mediator Rasional Berbasis Perubahan Kebijakan Amerika Serikat dan Aksi Mediasi dalam Sengketa Irian Barat
Bidang Keahlian	: Hubungan Internasional (30.02)
No. SK Pangkat Terakhir	: Keppres RI No 23/K Tahun 2020
No. SK Peneliti Ahli Utama	: Keppres RI No 80/M Tahun 2019

B. Pendidikan Formal

No.	Jenjang	Nama Sekolah/ Universitas	Tempat/ Kota/Negara	Tahun Lulus
1.	SD	SD Negeri Makasar I Jakarta	Jakarta	1974
2.	SMP	SMP Negeri XLIX Jakarta	Jakarta	1977
3.	SMA	SMA Negeri 39 Jakarta	Jakarta	1981
4.	S1	Sarjana (S1) dari Fisipol-Hubungan Internasi- onal, Universitas Jaya Baya	Jakarta	1987
5.	S2	Magister (S2) dari Pascasarjana, Program Kajian Wilayah Amerika Universitas Indonesia	Depok	1997
6.	S3	Gelar Doktor (S3) dari Juru- san Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia	Depok	2008

C. Jabatan Struktural

No.	Jabatan/ Pekerjaan	Nama Instansi	Tahun
1.	Kepala Sub Bagian Kerja sama Regional	Biro kerja sama Iptek-(BKI) LIPI	1997–1999
2.	Kepala Bidang Perkem- bangan Eropa	Puslit Sumber Daya Regional (PSDR- LIPI)	2009–2013
3.	Kepala Bidang Pengelo- laan & Diseminasi Hasil Penelitian	Puslit Politik-LIPI	2015–2017

D. Jabatan Fungsional

No.	Jenjang Jabatan	TMT Jabatan
1.	Ajun Peneliti Muda	01 Desember 2000
2.	Ajun Peneliti Madya	01 Oktober 2002
3.	Peneliti Muda	01 Juli 2004
4.	Peneliti Ahli Madya	01 Januari 2006
5.	Peneliti Ahli Utama	01 Februari 2020

E. Penugasan Khusus Nasional/Internasional

No.	Jabatan/Pekerjaan	Pemberi Tugas	Tahun
1.	Peserta pelatihan <i>Science & Tech. Adm</i> di Ishikawa, Jepang	Kepala Biro kerja sama Iptek LIPI	1999
2.	Ketua Panitia Seminar Internasional mengenai Dinamika Politik & Keamanan di Semenanjung Korea.	Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI	2016
3.	Menjadi konsultan pada Puslitbang POLRI untuk penelitian tentang keamanan Pemilu	Kepala Pusat Penelitian Politik	2019
4.	Menjadi konsultan pada Puslitbang POLRI untuk penelitian tentang SPKT POLRI	Kepala Pusat Penelitian Politik	2019
5.	Menjadi konsultan pada Puslitbang POLRI untuk penelitian tentang <i>Quick Win</i>	Kepala Pusat Penelitian Politik	2019
6.	Menjadi anggota Komisi Etik IPSK LIPI	Kepala Pusat Penelitian Politik	2020

F. Keikutsertaan dalam Kegiatan Ilmiah

No.	Nama Kegiatan	Peran/Tugas	Penyelenggara/ Kota	Tahun
1.	Diskusi Hubungan Indonesia-Amerika Serikat	Pembicara	Harian Kompas, Jakarta	2008
2.	Diskusi Pemilu dan Proyeksi Polugri Amerika Serikat	Pembicara	Kemlu, Jakarta	2016
3.	Diskusi Polugri Amerika Serikat: Dua Tahun Pemerintahan Donald Trump	Pembicara	Universitas Brawijaya & Kemlu, Malang.	2019

G. Keterlibatan dalam Pengelolaan Jurnal Ilmiah

No.	Nama Jurnal	Penerbit	Peran/Tugas	Tahun
1.	Jurnal Kajian Wilayah	PSDR-LIPI	Pemimpin Redaksi	2009–2013
2.	Jurnal Penelitian Politik	P2P-LIPI	Mitra Bestari	2020–2021
3.	Jurnal Hubungan Luar Negeri	Kemlu RI	Mitra Bestari	2021

H. Karya Tulis Ilmiah

No.	Kualifikasi Penulis	Jumlah
1.	Penulis Tunggal	28
2.	Bersama Penulis lainnya	12
Total		40

No.	Kualifikasi Bahasa	Jumlah
1.	Bahasa Indonesia	35
2.	Bahasa Inggris	5
Total		40

I. Pembinaan Kader Ilmiah

Pejabat Fungsional Peneliti

No.	Nama	Instansi	Peran/Tugas	Tahun
1.	Abdul Fikri Angga Reksa, Angga Bagus Bismoko	PSDR-LIPI	Memimpin kandidat peneliti untuk Uji Instrumen Penelitian Global Village di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan	2017
2.	Yusup Maulana	P2 Politik-LIPI	Koordinator Uji Instrumen Penelitian Global Village di Jakarta Barat dan Jakarta Selatan	2017

J. Mahasiswa

No.	Nama	PT/Universitas	Peran/Tugas	Tahun
1.	M. Henri Kurniawan	Fisip HI Universitas Pasundan, Bandung	Pembimbing Magang	2019
2.	Noviyanti	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang	Pembimbing Magang	2019
3.	Martinus S. Prayogo	Sekolah Global dan Strategi Program Kajian Amerika, Universitas Indonesia	Pembimbing Tesis Berjudul <i>US Security Assistance</i> dalam Proses Integrasi dan Pelepasan Timor Timur.	2009

Buku ini tidak diperjualbelikan.

K. Organisasi Profesi Ilmiah

No.	Nama Jabatan	Nama Organisasi	Tahun
1.	Anggota	Himpenindo	2019

L. Tanda Penghargaan

No.	Tanda Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1.	Satyalancana Karya Satya X Tahun	Presiden Republik Indonesia	2001
2.	Satyalancana Karya Satya XX Tahun	Presiden Republik Indonesia	2010
3.	Satyalancana Karya Satya XXX Tahun	Presiden Republik Indonesia	2021

M. Pendidikan Non-Formal

No.	Nama Pendidikan/Pelatihan	Tempat & Penyelenggara	Tahun
1.	Diklatpim Tk.IV, tahun 1997 di	Jakarta, LIPI	1997
2.	<i>The Individual Training Course, in Science and Technology Administration</i>	Ishikawa Prefecture, Jepang, JICA	1999



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung BJ Habibie, Jl. M.H. Thamrin No.8,
Kb. Sirih, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: lipipress.lipi.go.id

DOI: 10.14203/press.492



ISBN 978-602-496-308-8



Buku ini tidak diperjualbelikan.